



► LAYANAN KESEHATAN

RS Jogja Keluhkan Klaim BPJS

UMBULHARJO- Manajemen Rumah Sakit Jogja atau RS Wirosaban, mengeluhkan lambatnya proses pencairan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sejak beberapa bulan terakhir.

*Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com*

► Keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan terjadi sejak Oktober 2017 lalu sampai akhir Februari 2018 ini.

► Alasan BPJS tidak segera mencairkan klaim rumah sakit karena harus menunggu transfer dari BPJS Pusat.

Jika keterlambatan itu terus terjadi, berpotensi mengganggu layanan kesehatan karena rumah sakit milik Pemerintah Kota Jogja ini tidak memiliki dana cadangan operasional. "Keterlambatan itu bagi kami sudah cukup mengganggu operasional, layanan kepada pasien dan juga pemenuhan kebutuhan obat serta alat medis lainnya," kata Direktur Rumah Sakit Jogja, Tuty Setyowati, dalam rapat kerja dengan Komisi D di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Rabu (28/2).

Tuty mengatakan keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan terjadi sejak Oktober 2017 lalu sampai akhir Februari 2018 ini. Total klaim BPJS mencapai Rp23,5 miliar. Pihaknya sudah mengajukan pencairan klaim sejak 25 Januari sebesar Rp9,7 miliar, kemudian pada 31 Januari sebesar Rp4,5 miliar. Kemarin, Rumah Sakit Jogja juga mengajukan klaim kembali sebesar Rp9 miliar. Namun, belum ada yang dicairkan.

Menurut Tuty, alasan BPJS tidak segera mencairkan klaim rumah sakit karena harus menunggu transfer dari BPJS Pusat. Ia hanya berharap pencairan klaim bisa tepat waktu. Sebab, sebanyak 90% lebih pasien Rumah Sakit Jogja adalah peserta BPJS, sehingga klaim BPJS menjadi sumber utama dana operasional rumah sakit dan kelancaran layanan kesehatan.

Akibat keterlambatan itu, Rumah Sakit Jogja harus pontang-ponting mencari pinjaman, bahkan utang obat kepada distributor sebesar Rp13 miliar pun belum bisa dibayar. "Kami usahakan agar pasokan obat tetap berjalan," ujar Tuty.

Tuty menambahkan untuk mengantisipasi kejadian serupa, pada pembahasan APBD tahun depan pihaknya akan meminta suntikan dari Pemerintah Kota Jogja untuk biaya operasional rumah sakit yang setiap bulannya membutuhkan Rp5 miliar untuk obat, belum termasuk jasa tenaga medis.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Segera

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto mengatakan dengan kondisi keuangan yang terjadi di Rumah Sakit Jogja saat ini, rumah sakit pelat merah tersebut hanya bisa bertahan satu bulan ke depan jika klaim BPJS Kesehatan tidak segera dicairkan.

Fokki menduga kondisi yang terjadi di Rumah Sakit Jogja juga terjadi di rumah sakit lainnya yang bekerja sama dengan BPJS. "Ini bisa dibayangkan sudah darurat pelayanan kesehatan yang mengancam hak warga negara mendapatkan layanan kesehatan," kata Fokki.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) ini khawatir kejadian serupa terus terulang. Karena itu, Komisi D bersama Pemerintah Kota Jogja, direksi Rumah Sakit Jogja, dan asosiasi rumah sakit swasta berencana konsultasi ke BPJS Kesehatan Pusat di Jakarta dan Kementerian Keuangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kesepakatan

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jogja, Dwi Hesti Yuniarti mengatakan sudah ada kesepakatan pembayaran terkait dengan pengajuan klaim dari Rumah Sakit Jogja. Kesepakatan tersebut adalah BPJS siap membayarkan semua klaim namun secara bertahap.

Sebab, kata Hesti, klaim dari Rumah Sakit Jogja tidak hanya tahun berjalan, namun nominal klaim itu merupakan akumulasi sejak 2016 lalu sehingga butuh kesabaran untuk melunasinya. "Karena kami tidak hanya melayani rumah sakit daerah, tapi banyak rumah sakit lainnya juga," kata dia.

Sementara untuk klaim tahun berjalan, pihaknya memastikan pencairan klaim paling lambat 15 hari setelah klaim diajukan. Sampai saat ini, ia mengklaim banyak rumah sakit yang terlayani sesuai dengan aturan, kecuali klaim tahun-tahun sebelumnya, namun baru diajukan sekarang. Ia menegaskan untuk persoalan Rumah Sakit Jogja sudah dibahas bersama Dinas Kesehatan DIY, bahkan sudah ada kesepakatan penyelesaiannya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. RSUD (RS Jogja)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005